



**TRANSISI SUB-DIMENSI MODAL SOSIAL DAN PENGARUHNYA
TERHADAP DISPARITAS PEMBANGUNAN PAPUA BARAT DI
KABUPATEN MANOKWARI DAN KOTA SORONG**

**TRANSITION OF SOCIAL CAPITAL SUB-DIMENSION AND ITS IMPACT ON
REGIONAL DEVELOPMENT DISPARITY WEST PAPUA
IN MANOKWARI REGENCY AND SORONG CITY**

**Michael Albert Baransano^{1*}, Fenny Salomina Jensanura Asyerem²,
Eka Intan Kumala Putri³, Noer Azam Achsani⁴, Lala M. Kolopaking⁵**

^{1,2}Fakultas Pertanian Universitas Papua

Jl. Gunung Salju Amban, Manokwari, Papua Barat, 98311

^{3,4}Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor

⁵Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor

Jl. Meranti Kampus IPB Dramaga, Bogor, Jawa Barat, 16680

Dikirim : 8 November 2022; Disetujui: 30 November 2022; Diterbitkan: 12 Desember 2022

DOI: [10.47039/ish.4.2022.67-81](https://doi.org/10.47039/ish.4.2022.67-81)

Inti Sari

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai modal sosial dan transisi dari sub dimensi modal sosial serta dampaknya terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Papua Barat. Penelitian ini menggunakan sistem skoring dan regresi logistik berganda. Hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan kuisioner dan wawancara mendalam terhadap responden menunjukkan bahwa nilai modal sosial berada pada kategori “kuat” dan telah terjadi transisi sub dimensi modal sosial dari *thick trust* menjadi *thin trust* yang disebabkan karena responden telah tinggal menetap secara bersama, budaya inklusif orang Papua, otonomi khusus, dan kawin campur. Hasil penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa model ekonometrika dengan regresi logistik menjelaskan bahwa variabel trust (X2), dengan nilai odds ratio sebesar 18,75 memberikan implikasi bahwa trust (kepercayaan) mempunyai dampak yang lebih besar dalam mengurangi tingkat disparitas wilayah sebesar 18,75 kali dibandingkan dengan norm (X3), network (X4), dan tempat tinggal (X5) jika nilainya sama.

Kata kunci: modal sosial, pembangunan wilayah, Provinsi Papua Barat.

Abstract

The aims of this study focus on analyse about the recent value of social capital and transition of its sub-dimension as well as its impact on regional development disparity in West Papua Province. This study uses a scoring system and multiple logistic regression. The result based on questionnaires and in-depth interviews showed that the recent value of social capital that are in the category of “strong” and there has been a transition from the thick trust into thin trust caused by the settled live together, inclusive culture of the people of Papua, local autonomy, and mix married. At the same time, the result further suggested that an econometric model of logistic regression explains that variable of trust (X2) with an odds ratio about 18.75 implies that the trust have a greater influence in reducing regional development disparities 18.75 times compared with the variable of norm (X3), network (X4) and place of settled (X5) if they have the same value.

Keywords : social capital, regional development, West Papua Province

* Korespondensi Penulis

Tlp : +6281285950826

Email : m.baransano@unipa.ac.id



I. PENDAHULUAN

Dewasa ini modal sosial merupakan komponen yang penting dalam pembangunan suatu wilayah, di mana perubahan-perubahan konsep institusi sosial dan sistem nilai yang dianut dalam suatu tataran masyarakat seperti *trust*, *norm* dan *networks* dapat mempengaruhi produktifitas masyarakat dalam pembangunan ekonomi wilayah secara keseluruhan. Menurut [Karlssons dkk \(2012\)](#) dan [Arrow \(2000\)](#) konsep modal sosial telah memberikan ruang tersendiri yang menarik bagi para peneliti dari berbagai disiplin ilmu seperti ekonomi, manajemen ekonomi wilayah, serta ilmu politik, antropologi dan sosiologi untuk melakukan kajian-kajian terkait dengan modal sosial. Konsepnya telah menambah khasanah penelitian terkait dengan pendekatan yang digunakan dalam menganalisis peran dari faktor-faktor yang *intangible* seperti *trust*, *network*, *norm* dan *institution* dalam pembangunan ekonomi wilayah. Bagaimanapun juga, kesulitan dalam mendefinisikan, mengoperasionalkan, mengidentifikasi dan mengukur modal sosial mengimplikasikan bahwa secara teoritis dan empiris dibutuhkan penelitian yang dapat memahami secara baik dan mampu mendesain kebijakan pembangunan wilayah yang mengembangkan peran modal sosial ([Karlsson et al., 2012](#)).

Modal sosial dipopulerkan oleh [Putnam \(1993\)](#) dalam [Ottebjer \(2005\)](#) terkait dengan peran modal sosial dalam perspektif ekonomi wilayah, meskipun sebelumnya telah dikembangkan oleh [Bourdieu \(1980\)](#), [Coleman \(1988\)](#) dan peneliti lainnya dalam [Ottebjer 2005](#). [Putnam \(1993\)](#) mendefinisikan modal sosial sebagai gambaran fitur yang dimiliki oleh organisasi sosial, seperti sikap percaya, norma dan jejaring yang mampu memperbaiki efisiensi masyarakat melalui fasilitasi berbagai tindakan terkoordinasi, artinya ada tindakan bersama secara efektif untuk mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan penelitian di Italia, [Putnam](#) mengidentifikasi komponen-komponen kunci dari modal sosial dan berargumen bahwa keberadaannya merupakan prakondisi untuk mencapai pembangunan ekonomi dan sistem pemerintahan yang efektif. Lebih lanjut [Rustiadi et al., \(2011\)](#) menjelaskan unsur-unsur modal sosial dalam pembangunan wilayah sebagai berikut: Pertama; *trust* (sikap percaya) akan

membangun rasa tanggung jawab dan rasa dihargai, yang kemudian akan menimbulkan kepercayaan kepada yang memberikan kepercayaan, sehingga bersifat timbal balik (*reciprocal trust*).

Hal ini menunjukkan bahwa dalam berinteraksi dengan orang ada resiko, oleh karenanya ada ketidakpastian (*uncertainty*) tentang orang-orang di sekitar, sehingga hubungan saling percaya (*trust*) adalah kesediaan mengabaikan adanya resiko dalam berinteraksi. Pada dasarnya terdapat dua tipe *trust*; (1) *thick trust*, muncul karena adanya kesamaan asa dengan individu yang kita ketahui, dan (2) *thin trust*, hubungan kepercayaan dengan orang-orang yang tidak kita ketahui tetapi kepercayaan tersebut adalah kepercayaan kepada struktur sosial yang kita kenal. *Thin trust* sendiri ada di berbagai level dalam pembangunan wilayah dan biasanya lebih sulit dibangun, oleh sebab itu yang paling penting dikelola dalam perencanaan pembangunan wilayah adalah *thin trust*. Kedua; norma (*norm*), adalah sekumpulan aturan-aturan ataupun ketentuan-ketentuan atau juga sanksi yang berlaku di suatu komunitas/ masyarakat baik yang formal dan non formal.

Norma adalah hak sosial dalam mengontrol tindakan-tindakan individu. Norma diperlukan untuk mencegah eksternalitas negatif, mencegah aktivitas *free rider* serta untuk mengurangi perilaku-perilaku oportunistik. Ketiga; jejaring (*network*), berdasarkan unsur *networking*, modal sosial dibedakan menjadi tiga tipe: (1) *bonding social capital* dicirikan oleh kuatnya ikatan (pertalian) seperti antar anggota keluarga atau antar anggota dalam kelompok etnis tertentu. Beberapa pandangan menyamakan ikatan ini dengan *thick trust* yaitu modal sosial yang terbangun akibat adanya rasa percaya antara kelompok orang yang saling mengenal, (2) *bridging social capital* dicirikan oleh semakin banyaknya ikatan antar kelompok, misalnya asosiasi bisnis, kerabat, teman dari berbagai kelompok etnis yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh [Tabellini \(2010\)](#) dalam menganalisis perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi di 54 negara Eropa selama periode 1950-1998 menunjukkan bahwa *bridging social capital* berpengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Modal sosial tipe kedua ini terbangun dari *thin trust*, rasa percaya

kepada sekelompok orang yang belum dikenal, dan (3) *linking social capital* dicirikan oleh hubungan antar berbagai tingkat kekuatan dan status sosial yang berbeda seperti keterkaitan antar elite politik atau antar individu dari berbagai kelas sosial yang berbeda.

Dampak positif maupun negatif yang menyertai pembangunan ekonomi wilayah di Provinsi Papua Barat muncul di era otonomi daerah. Munculnya konflik-konflik horisontal antar kelompok dalam suatu wilayah ataupun antar wilayah mengarah pada aktivitas anarkis yang sangat mengganggu keamanan dan kenyamanan. Berdasarkan sudut pandang modal sosial, hal tersebut merupakan salah satu indikator melemahnya rasa percaya, networking dan norma-norma bersama yang selama ini ditaati oleh masyarakat. Melemahnya modal sosial akan menyebabkan pembangunan wilayah tidak dapat berjalan dengan sempurna karena tingginya biaya transaksi yang harus dikeluarkan sebagai substitusi terhadap modal sosial yang hilang (Helliwell, 1996; Karlsson et al., 2012; Reimer et al., 2008; Rustiadi et al., 2018; Vervisch et al., 2013).

Berkembangnya pembangunan wilayah Papua Barat dalam sudut pandang ekonomi regional merupakan suatu kondisi perekonomian yang menjanjikan bagi migran dari luar Papua Barat untuk dapat mencari penghidupan yang layak di perantauan. Secara positif kondisi ini akan memberikan penguatan dalam membangun *bridging social capital* serta kemungkinan menggeser *bonding social capital* akibat kompleksitas penduduk asli dan pendatang yang berbaur dalam pembangunan. Semakin menguatnya *bridging social capital* di Papua Barat diakibatkan melemahnya rasa percaya (*thick trust*) dan justru menguatkan *thin trust* di antara sesama penduduk asli dan pendatang akibat tingginya perilaku oportunistik terutama di kalangan birokrat Papua pada lingkungan pemerintah daerah (tingginya korupsi, kolusi dan nepotisme).

Selain itu kurang kuatnya norma-norma yang seharusnya dibangun melalui *bonding social capital* dan *thick trust* dalam mengontrol perilaku masyarakat akibat lemahnya sanksi sosial yang diterapkan. Menguatnya *bridging social capital* dan *linking social capital* di Papua Barat sangat terkait erat dengan konteks budaya orang Papua, seperti diketahui bahwa hubungan kekeluargaan orang Papua tidak

bersifat eksklusif tetapi inklusif, artinya tidak terbatas pada sanak saudara atau klen sendiri, dimana seorang kenalan ataupun kawan dari suku lain bahkan bangsa lain “terhisap” dan diterima sebagai kerabat angkat (Rumere & Onim, 2005), misalnya saja saat ini beberapa komunitas adat Papua sering melakukan pengukuhan kepada kenalan atau sahabat sebagai bapak atau ibu angkat ataupun pengukuhan sebagai “Anak Adat” (Kepala Suku) dari kelompok suku tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besaran nilai modal sosial saat ini serta transisi subdimensi modal sosial dan menganalisis keterkaitan subdimensi modal sosial dalam mengurangi tingkat disparitas pembangunan wilayah di Provinsi Papua Barat.

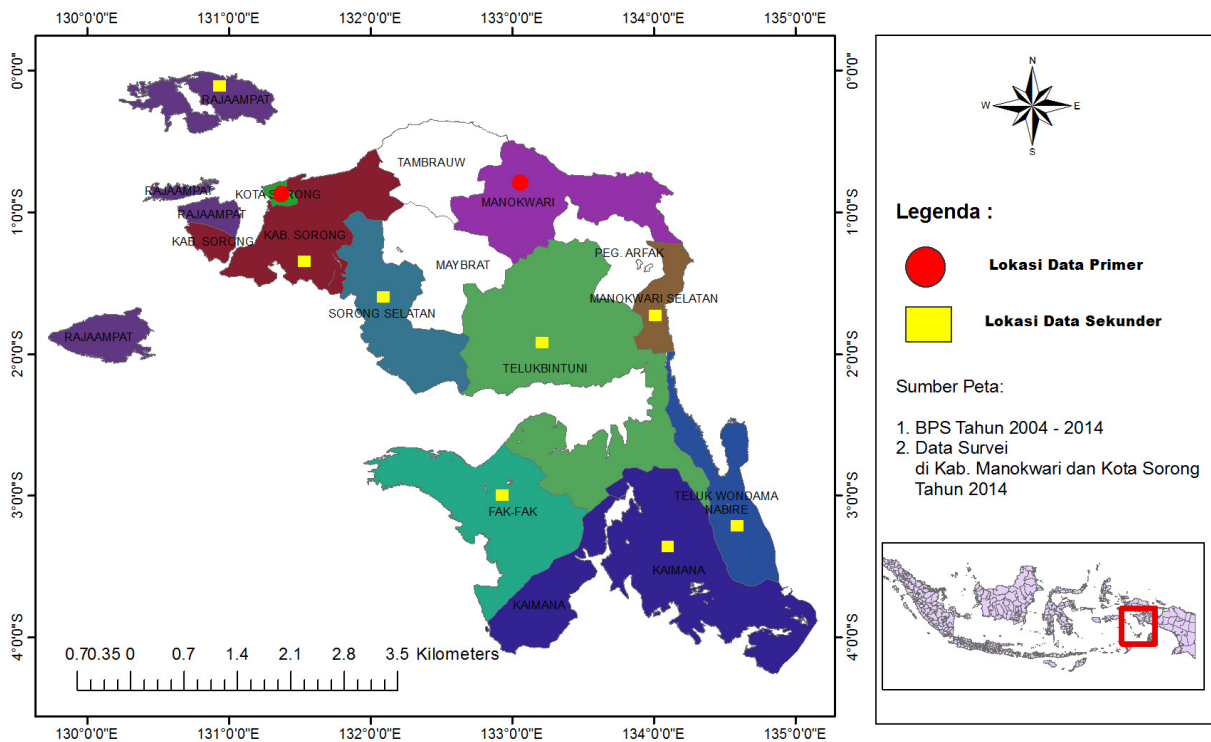
II. METODE

A. Lokasi dan Waktu

Alasan pemilihan Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong sebagai lokasi sampling pengambilan data survei modal sosial adalah, karena kedua kabupaten/kota memiliki populasi penduduk yang heterogen dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya sehingga akan lebih memperdalam analisis mengenai modal sosial khususnya subdimensi *trust (bridging social capital/thin trust* dan *bonding social capital/thick trust*). Penelitian berlangsung sejak Agustus 2014 sampai dengan November 2014. Lokasi penelitian dapat dilihat pada gambar 1.

B. Metode Penentuan Responden Modal Sosial

Responden yang diteliti dalam penelitian ini merupakan perwakilan dari rumah tangga, lembaga adat/organisasi sosial, lembaga pemerintah dan lembaga keagamaan pada dua wilayah sampling yaitu Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Penentuan responden dilakukan berdasarkan prosedur *nonprobability sampling* menggunakan teknik *quota sampling* dengan jumlah sampel responden rumah tangga sebanyak 20 responden, lembaga adat 10 responden, lembaga pemerintah 10 responden dan lembaga keagamaan 10 responden, sehingga diperoleh total responden setiap kabupaten/kota sebanyak 50 responden.



Gambar 1. Peta lokasi penelitian

C. Metode Penghitungan Modal Sosial

Penghitungan terhadap nilai modal sosial di Provinsi Papua Barat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif berdasarkan sebaran nilainya pada garis kontinum yaitu Tidak Peduli, Tidak Percaya, Kurang Percaya, Percaya, Sangat Percaya, berdasarkan total skor jawaban responden sesuai kriteria pertanyaan masing-masing subdimensi modal sosial (*trust, norm, network*) menggunakan Skala Likert (Faisal, 2008; Riduwan & Kuncoro, 2011) dengan sebaran pengukuran total nilai modal sosial dapat dilihat pada garis kontinum berikut.



Di mana: skor tertinggi = skor tertinggi kategori jawaban responden dikalikan total jumlah responden; skor terendah = skor terendah kategori jawaban responden dikalikan total jumlah responden. Sehingga kategori nilai modal sosial dikelompokkan sesuai sebaran pada Tabel 1.

Tabel 1.

Sebaran nilai modal sosial di Provinsi Papua Barat

No	Kategori nilai modal sosial	Total skoring
1	Sangat kuat	80,1 - 100
2	Kuat	60,1 - 80
3	Cukup kuat	40,1 - 60
4	Lemah	20,1 - 40
5	Sangat lemah	0 - 20

D. Metode penghitungan subdimensi *trust, norm* dan *network*

Penghitungan terkait subdimensi *trust, norm* dan *network* di Papua Barat dilakukan dengan menganalisis total nilai masing-masing variabel subdimensi yang diberikan oleh responden (rumah tangga, lembaga adat/ sosial, lembaga pemerintah dan lembaga keagamaan) melalui jawaban kuisioner dan wawancara mendalam (*indepth interview*).

E. Regresi Logistik Berganda

Untuk mengetahui peran modal sosial dalam disparitas pembangunan wilayah di Provinsi Papua Barat, digunakan model

logit (regresi logistik). Model regresi logistik gandanya adalah:

$$P(X_i) = \frac{1}{1 + e^{-g(X_i)}} = \frac{e^{g(X_i)}}{1 + e^{g(X_i)}} \quad (1)$$

dan logit dari model pada Persamaan (1) di atas adalah:

$$g(x_i) = \ln \frac{P(x_i)}{1 - P(x_i)} \\ = \beta_1 + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \dots + \beta_k X_{ki} \quad (2)$$

Setelah diperoleh dugaan model pada Persamaan (1) di atas maka dilanjutkan dengan menguji apakah model logit tersebut secara keseluruhan dapat menjelaskan keputusan pilihan kualitatif (Y) dengan hipotesis statistik yang diuji adalah:

$H_0 : \beta_2 = \beta_3 = \dots = \beta_k = 0$ (model tidak dapat menjelaskan)

$H_1 : \text{minimal ada } \beta_j \neq 0, \text{ untuk } j=2, 3, \dots, k$ (model dapat menjelaskan)

Statistik uji yang digunakan dalam menguji hipotesis ini adalah dengan *likelihood ratio* (uji-G) yaitu rasio fungsi kemungkinan model_{UR} (lengkap) terhadap fungsi kemungkinan model_R (H_0 benar). Statistik uji-G di bawah ini menyebar menurut sebaran khi-kuadrat dengan derajat bebas (k-1).

$$= -2 \ln \left[\frac{\text{likelihood_Model}_R}{\text{likelihood_Model}_{UR}} \right] = 2 \ln \left[\frac{\text{likelihood_Model}_{UR}}{\text{likelihood_Model}_R} \right] \approx X^2_{(k-1)} \\ = 2[\ln(\text{likelihood_Model}_{UR}) - \ln(\text{likelihood_Model}_R)] \quad (3)$$

Jika menggunakan taraf nyata α , hipotesis H_0 ditolak (model signifikan) bila statistik $-G > X^2_{\alpha, k-1}$. Jika H_0 ditolak maka dapat disimpulkan bahwa minimal ada $\beta_j \neq 0$ artinya model pada Persamaan (10) dapat menjelaskan atau memprediksi pilihan individu pengamatan. Untuk menguji faktor mana ($\beta_j \neq 0$) yang berpengaruh nyata terhadap pilihannya perlu dilakukan uji statistik lanjut yang dalam hal ini dapat menguji signifikansi dari parameter koefisien secara parsial dengan statistik uji Wald yang serupa dengan uji-t atau uji- \hat{Y} dalam regresi linear biasa. Hipotesis statistik yang diuji adalah:

$H_0 : \beta_j = 0, \text{ untuk } j = 2, 3, \dots, k$ (peubah X_j tidak berpengaruh nyata)

$H_1 : \beta_j \neq 0$ (peubah X_j berpengaruh nyata)

Statistik uji yang digunakan adalah:

$$W = \frac{\beta_j}{se(\beta_j)} \quad (4)$$

Nilai-p dua arah dari statistik uji Wald ini adalah $P(|Z| > W)$ di mana Z adalah peubah acak normal baku.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Identitas responden modal sosial berdasarkan sebaran umur, jenis kelamin dan kelompok suku disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Sebaran umur, jenis kelamin dan kelompok suku responden

No	Sebaran umur (tahun)	Jenis kelamin (jiwa)		Kelompok suku (jiwa)	
		L	P	Papua	Non Papua
1	< 15	-	-	-	-
2	15-55	63	28	65	24
3	> 55	8	1	1	10
Jumlah		71	29	66	34

Data pada Tabel 2 di atas menjelaskan bahwa sebagian besar responden berada pada kelompok usia produktif (91%) dan terbagi atas kelompok suku-suku Papua sebanyak 66% dan non-Papua sebanyak 34%.

B. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan tertinggi yang ditempuh oleh responden dapat dilihat pada Tabel 3

Tabel 3. Tingkat pendidikan responden

No	Kelompok Suku	Tingkat pendidikan				Jml
		SD	SMP	SMA	PT	
1	Papua	4	4	26	32	66
2	Non Papua	-	-	12	22	34

Kelompok migran yang datang dari luar Provinsi Papua Barat semuanya memiliki tingkat pendidikan yang cukup baik di mana sebagian

besar (22%) pernah mengenyam pendidikan sampai dengan Perguruan Tinggi sehingga sudah barang tentu memiliki kemampuan *soft skill* dan *hard skill* yang lebih baik untuk berkompetisi mendapatkan pekerjaan ataupun menciptakan lapangan pekerjaan.

C. Skor Modal Sosial di Papua Barat

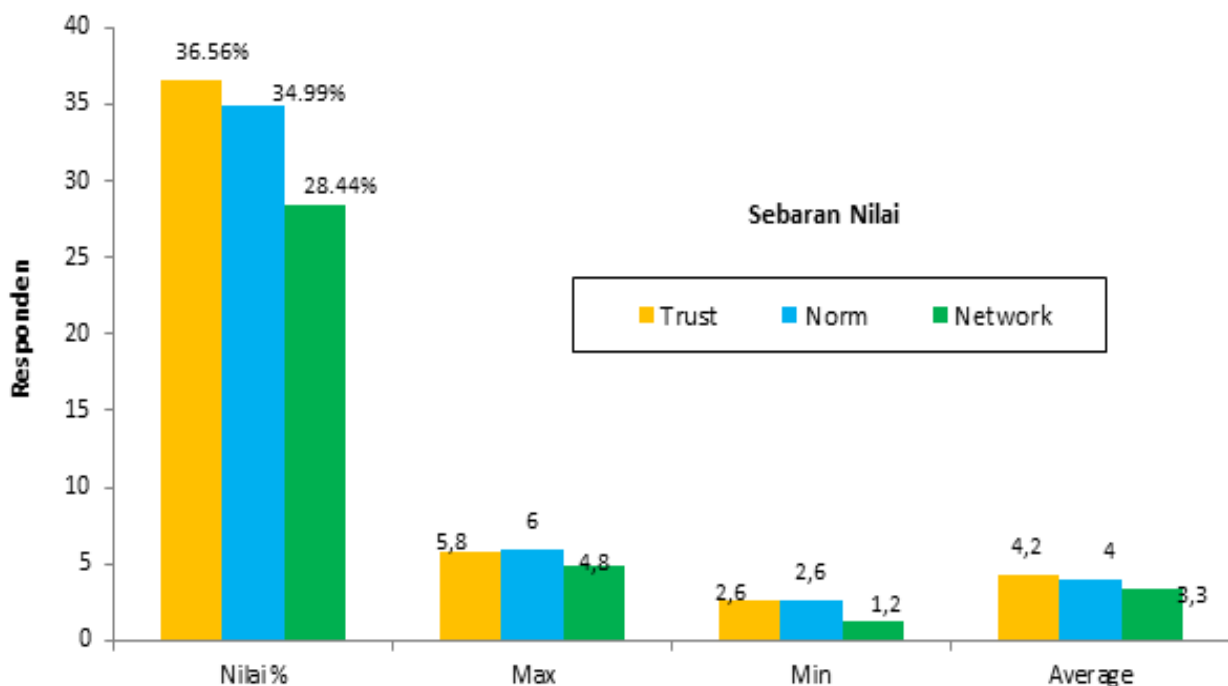
Nilai modal sosial setelah dilakukan penghitungan sesuai hasil skor dan pembobotan berdasarkan data survei di Kabupaten Manokwari maupun Kota Sorong, diperoleh nilai modal sosial di Papua Barat sebesar 67,38% dan sesuai dengan kategori serta skoring pada Tabel 1 di atas maka nilai tersebut berada pada sebaran kategori “kuat”.

Pengukuran modal sosial di Papua Barat juga menghasilkan nilai-nilai subdimensi pembentuk modal sosial yakni subdimensi *trust* yang meliputi sikap percaya terhadap pemerintah, percaya kepada aparat kelurahan maupun RT/RW dan percaya terhadap tetangga; subdimensi *norm* meliputi rasa toleransi beragama dan suku bangsa, hubungan kekerabatan dan persahabatan; subdimensi jejaring meliputi keterlibatan di dalam aktivitas sosial kemasyarakatan serta bagaimana membangun komunikasi dengan sesama di dalam kelompok masyarakat. Secara keseluruhan nilai kontribusi subdimensi *trust*, *norm* dan *network* terhadap modal sosial di

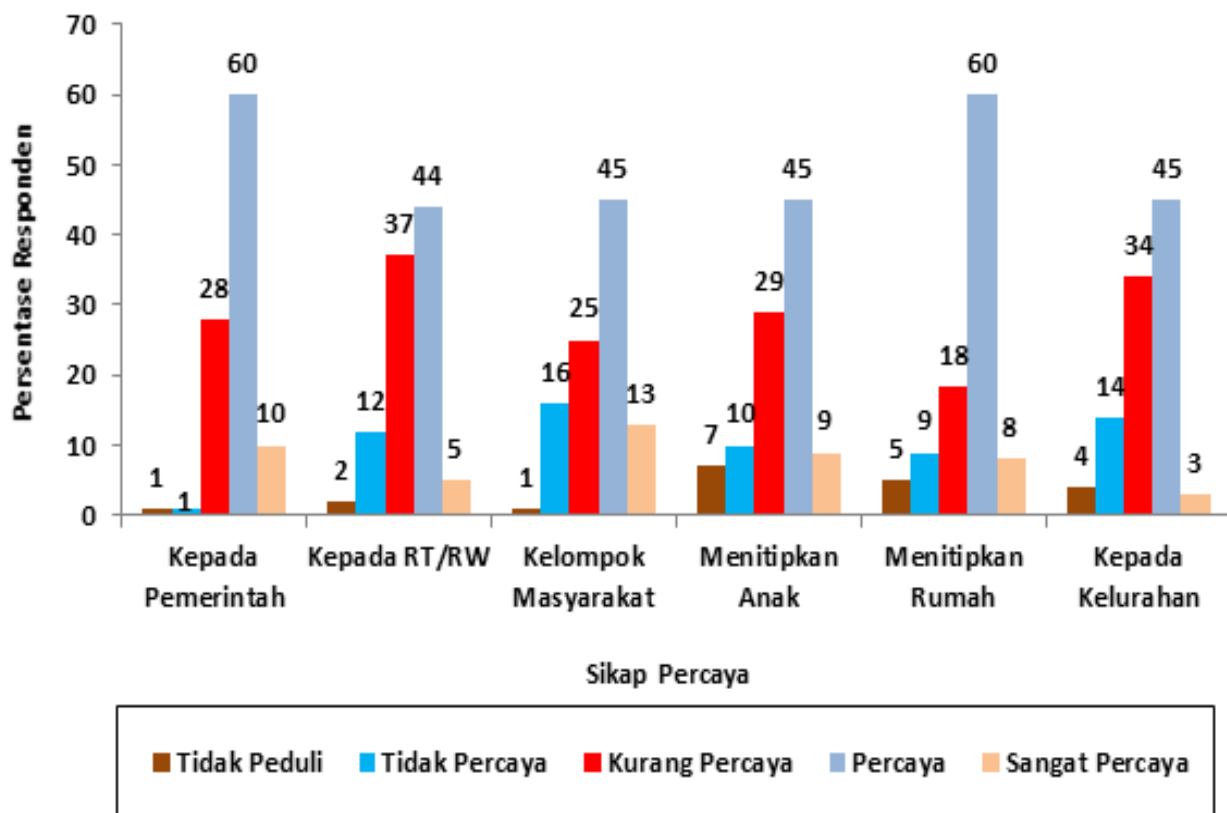
Papua Barat berdasarkan sebaran maximum, minimum dan rata-rata dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini.

Gambar 2 memperlihatkan bahwa kontribusi terbesar dari subdimensi pembentuk modal sosial di Papua Barat adalah *trust* dengan nilai kontribusi sebesar 36,56% disusul kemudian oleh subdimensi *norm* sebesar 34,99% dan kontribusi terendah disumbangkan oleh subdimensi *network* sebesar 28,44%. Total skor maximum responden terhadap subdimensi *trust* adalah 5,8 dan skor terendah sebesar 2,6 dimana tingginya skor tersebut dikarenakan sikap masyarakat selama ini sangat percaya terhadap pemerintah maupun aparat dibawahnya, selain itu kehidupan rukun membuat rasa percaya terhadap warga sangat tinggi karena kepercayaan akan membangun rasa tanggung jawab dan rasa dihargai sehingga menimbulkan tingkat kepercayaan kepada yang memberikan kepercayaan dan biasanya bersifat timbal balik (*reciprocal trust*), hal ini menurut Sakai (2012) bahwa *trust* yang dibangun dalam relasi dengan individu-individu di sekitar akan mempengaruhi keputusan kita dalam menentukan suatu pilihan dalam menciptakan keberimbangan ekonomi.

Di sini terlihat bahwa hubungan saling percaya yang telah dibangun (terinternalisasi) menyebabkan adanya kesediaan dalam



Gambar 2. Kontribusi nilai subdimensi terhadap modal sosial di Papua Barat



Gambar 3 . Persentase responden menurut sikap percaya

mengabaikan resiko saat berinteraksi. Gambar 3 berikut menunjukkan besaran persentase nilai subdimensi *trust* di Provinsi Papua Barat berdasarkan hasil penelitian.

Konsep pembangunan di Papua yang mengedepankan peran dari ketiga unsur yakni pemerintah, agama dan adat memberikan pengaruh signifikan dalam perkembangan pembangunan dengan melibatkan masyarakat secara langsung sebagai pelaku pembangunan. Sikap *trust* yang tinggi kepada pemerintah sebesar 60% menunjukkan bahwa responden yang berdomisili di Kabupaten Manokwari maupun Kota Sorong menaruh harapan kepada pemerintah karena menilai bahwa kebijakan-kebijakan pembangunan yang dieksekusi oleh pemerintah selalu bertujuan baik bagi kesejahteraan penduduknya.

Hal ini berimplikasi kepada keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap kebijakan pembangunan di daerah, meskipun tidak dipungkiri bahwa sikap apatis (sikap kurang percaya) sebagian masyarakat terhadap kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah masih tinggi (28%), kondisi ini disebabkan karena sebagian responden menilai bahwa kebijakan-kebijakan yang ada

hanya mengatasnamakan masyarakat tetapi dampaknya lebih dinikmati oleh sebagian oknum tertentu. Misalnya kebijakan tentang pendidikan dan kesehatan gratis, tetapi masyarakat masih harus mengeluarkan sejumlah biaya guna kepentingan berobat dan pendidikan. Tingkat kepercayaan kepada pemerintah juga terjadi secara berjenjang hingga kepada aparat pemerintahan di level kelurahan dimana hasil survey terhadap responden menunjukkan bahwa *trust* dengan indikator percaya kepada aparat kelurahan terutama dalam mengelola dana dalam hal kegiatan kolektif di lingkungan tempat tinggal sebesar 45%, misalnya kegiatan menjelang perayaan HUT RI maupun *event* lokal yang merupakan agenda tetap dari pemerintah daerah di lingkungan tempat tinggal.

Aparat kelurahan merupakan representasi pemerintah daerah pada tingkatan yang lebih tinggi di atasnya dalam suatu wilayah pemerintahan sehingga masyarakat percaya pada setiap tanggung jawab yang diemban oleh aparat kelurahan dalam memfasilitasi setiap tindakan kolektif di tingkat kelurahan. Masyarakat juga menunjukkan sikap percaya yang lebih tinggi kepada aparat RT/RW (44%),

kelompok masyarakat (45%) maupun tetangga yang berada bersama didalam suatu lingkungan tempat tinggal dalam hal menitipkan anak (45%) dan menitipkan rumah jika harus bepergian (60%). *Trust* kepada aparat RT/RW dan ataupun kelompok masyarakat dalam mengelola keuangan di lingkungan merupakan apresiasi dari responden sebagai kesempatan dalam mewujudkan tanggung jawab yang diemban karena aparat RT/RW maupun kelompok masyarakat dibentuk dan diangkat oleh masyarakat berdasarkan kecakapan dalam memberikan layanan yang holistik sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Sikap percaya kepada tetangga di lingkungan tempat tinggal telah dibangun sejak awal responden tinggal dan menetap, adanya hubungan kekeluargaan yang erat antar sesama warga merupakan wujud kepercayaan yang bersifat *reciprocal* (timbal balik).

Pada situasi ini terlihat bahwa responden non Papua dan Papua sudah membangun *thin trust* yang kuat diantara mereka, dimana pada lingkungan tempat tinggal *trust* yang dibangun telah bergeser dari *thick trust* menjadi *thin trust*. Pergeseran ini disebabkan karena empat hal berikut: (1) responden secara bersama-sama telah tinggal dan menetap di lingkungan dalam jangka waktu yang lama sehingga *thin trust* yang terbentuk melalui nilai-nilai hidup bersama telah terinternalisasi dalam aktivitas kesehariannya, (2) budaya orang Papua yang bersifat inklusif menyebabkan siapa saja yang merupakan sahabat atau kenalan dapat diterima menjadi bagian dari keluarga orang Papua. Sifat inklusif ini diwujudkan melalui pengukuhan sahabat atau kenalan menjadi "anak adat" atau "kepala suku besar" ataupun sebutan lain sesuai dengan bahasa suku di Papua, misalnya pemberian gelar "Mambri" oleh orang Byak kepada kenalan atau sahabat (dalam bahasa daerah Byak diartikan sebagai panglima perang) yang mana pengukuhan ini merupakan pemberian gelar kehormatan sebagai bagian yang melekat di dalam kelompok suku Papua tersebut dan biasanya dikaitkan dengan peran ataupun jasa yang telah didharmabhaktikan terhadap kelompok suku secara umum,

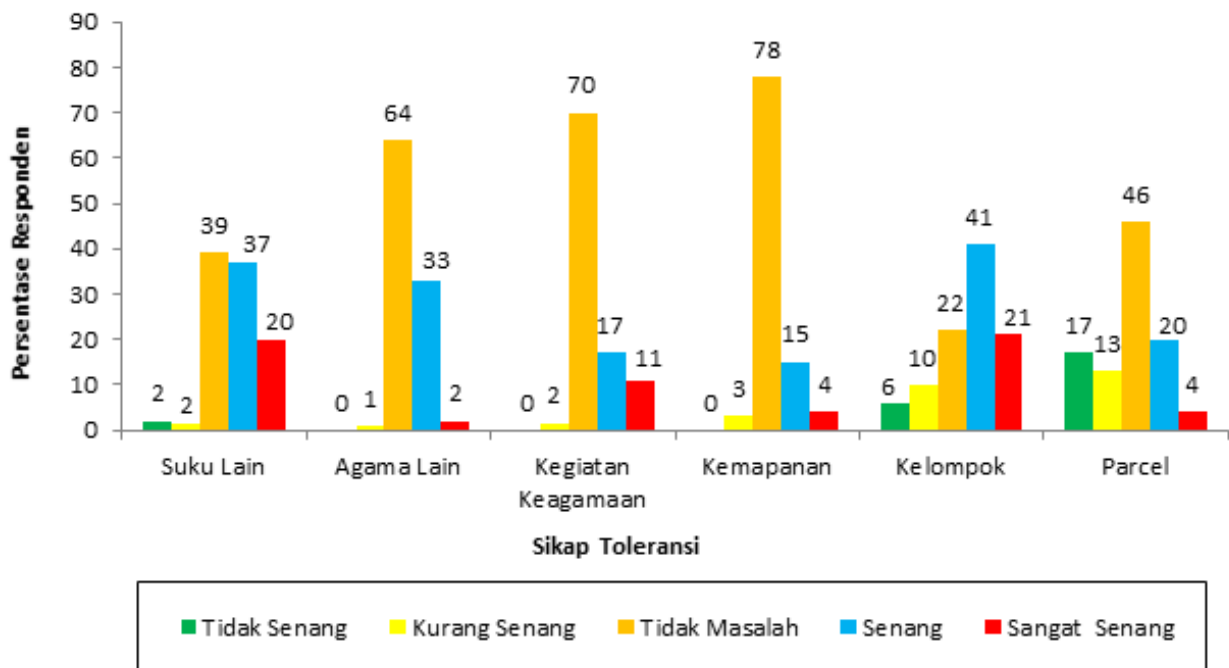
Selanjutnya, (3) pengaruh otonomi daerah telah memunculkan sentimen primordialisme diantara sesama suku Papua terutama antara Papua pemegang hak ulayat dan Papua migran

yang datang dari luar wilayah Papua lainnya, hal ini mengakibatkan Papua migran dan non Papua cenderung berinteraksi dalam membangun suatu kebersamaan, serta (4) kawin campur (*mix married*) menyebabkan *thin trust* dengan keluarga non Papua lebih kuat dibanding dengan sesama Papua dan secara perlahan mulai menggeser *thick trust*.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa selain sikap percaya yang tinggi, sikap kurang percaya dari responden menempati porsi kedua terbanyak yang ditunjukkan melalui nilai presentase sebesar 28% responden menyatakan kurang percaya terhadap setiap kebijakan pemerintah karena dinilai belum ada keberpihakan penuh dari pemerintah kepada masyarakat, unsur KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) masih menjadi penentu sasaran kebijakan pembangunan dari pemerintah. Sikap kurang percaya kepada pemerintah lebih dominan pada responden Papua, hal ini disebabkan responden Papua merasa termajinalkan terutama kesempatan untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dimana menjadi PNS di lingkungan pemerintah daerah oleh sebagain kelompok suku di Papua masih merupakan ukuran status sosialnya didalam masyarakat.

Kurangnya kesempatan agar menjadi PNS dipicu oleh tingkat pendidikan yang rendah sehingga tidak dapat mendominasi ataupun memenuhi syarat yang dibutuhkan dibanding dengan non Papua dengan tingkat pendidikan lebih tinggi. Responden Papua dan non Papua berimbang dalam memberikan respon kurang percaya terhadap aparat pemerintah yang lebih rendah dibawahnya (aparat kelurahan dan aparat RT/RW). Hal ini disebabkan tidak transparannya aparat maupun kelompok masyarakat dalam mengelola keuangan di lingkungan tempat tinggal, sikap percaya yang rendah terhadap tetangga disebabkan responden tersebut merupakan warga yang belum lama tinggal menetap. Sehingga *trust*nya lebih rendah dibanding dengan responden yang sudah tinggal menetap lebih lama, hal ini menyebabkan *trust* yang dibangun lebih kepada tipe *thick trust*.

Subdimensi *norm* dengan nilai kontribusi maximum terhadap pembentukannya sebesar 6, hal ini menunjukkan bahwa rasa toleransi yang tinggi di Papua Barat, merupakan modal sosial yang kuat dalam pembangunan wilayah.



Gambar 4. Persentase responden berdasarkan sikap toleransi

Meskipun memberikan kontribusi yang lebih rendah dibandingkan dengan *trust* (Iyer et al., 2005) terhadap level modal sosial di Papua Barat, toleransi terhadap kelompok suku dan agama serta entitas lainnya merupakan kehidupan bersama yang saling menghormati. Di mana Trigilia (2001) mengatakan bahwa existensi toleransi dalam hal relasi keagamaan, etnik, politik maupun bentuk toleransi lainnya merupakan basis bagi pertumbuhan modal sosial dalam mendukung pembangunan ekonomi. Sikap toleransi yang ditunjukkan oleh kelompok suku Papua terhadap non Papua dan sebaliknya merupakan suatu bentuk kehidupan yang saling menghargai. Perkembangan wilayah terutama di Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari menyebabkan tingginya arus migrasi masuk dari luar Papua menyebabkan penduduk semakin kompleks karena terdiri dari berbagai suku bangsa.

Responden terutama Papua tidak mempermasalahkan jika harus hidup bertetangga dengan kelompok suku lainnya karena menganggap bahwa semua manusia adalah sama, sikap toleransi ini menunjukkan besarnya kasih dan rasa hormat kepada sahabat atau kenalan. Perasaan senang bertetangga dengan orang dari suku lain memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan yang bisa didapat terkait dengan kebiasaan budaya kelompok suku non Papua, sehingga responden

menjadi lebih tahu ketika harus berinteraksi saat berada didalam komunitas non Papua.

Sikap toleransi antar umat beragama sangat kuat di wilayah Papua barat, salah satunya adalah konsep “*satu tungku tiga batu*”. Nilai toleransi yang tinggi mendorong masyarakat Papua tidak mempermasalahkan harus hidup berdampingan dengan non-Papua atau sesama Papua dari agama lain. Orang Papua menganggap bahwa agama adalah hal baru yang diintroduksi kedalam tatanan hidup mereka, sedangkan adat sudah lebih dahulu ada dan membentuk karakter hidup berbudaya sebagai suatu kelompok kekerabatan. Aktivitas keagamaan yang dilakukan selama ini di lingkungan tempat tinggal biasanya pada skala aktivitas yang lebih kecil antar keluarga misalnya pengajian pada keluarga muslim atau ibadah keluarga pada umat nasrani.

Skala aktivitas keagamaan yang lebih besar biasanya terkonsentrasi pada suatu lokasi tertentu dan disesuaikan dengan perayaan hari-hari besar keagamaan. Responden sebesar 78% tidak mempermasalahkan tingkat kemamanan orang lain, hal ini didukung pula oleh perilaku individualistis beberapa suku di Papua sehingga kemamanan setiap orang tergantung dari upaya dan kerja yang diraih (*achievement*) dari individu itu sendiri.

Budaya Papua tidak mengenal adanya stratifikasi berdasarkan lapisan sosial

masyarakat, sehingga sikap toleransi dan kehidupan bersama sangat terjalin dengan baik melalui intensitas komunikasi dengan tetangga dalam hal saling mengunjungi dan atau melakukan aktivitas olahraga bersama, menghadiri hajatan maupun mengantar makanan. Pada gambar 4 di bawah menunjukkan besaran kontribusi subdimensi *norm* di Papua Barat.

Subdimensi *network* memberikan kontribusi maximum sebesar 4,8% terhadap pembentukan subdimensinya, hal ini menunjukkan bahwa semakin luas *network* (jejaring) yang dimiliki seseorang akan memberikannya kemudahan akses terhadap sumberdaya dalam meningkatkan taraf hidup dan jati diri dalam masyarakat. Berdasarkan unsur *bridging social capital*, dapat dilihat bahwa terdapat ikatan (pertalian) yang kuat antar anggota keluarga dengan tingginya atau banyaknya anggota keluarga yang menjadi sahabat (65%). Pada gambar 5 menunjukkan besaran *network* di Papua Barat berdasarkan unsur *bridging social capital*.

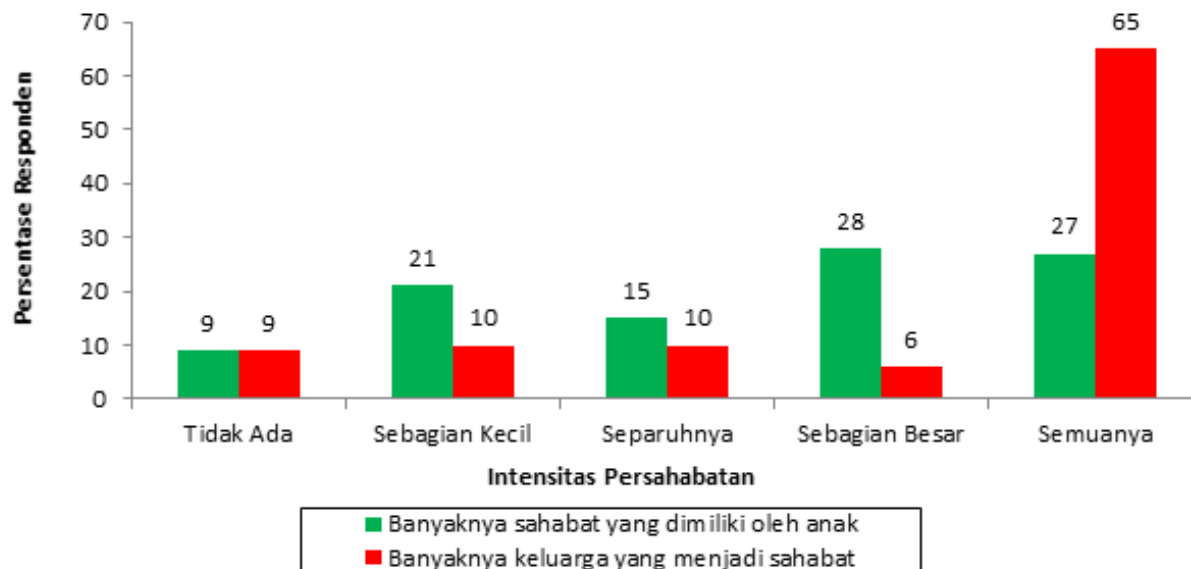
Unsur *network* lainnya yakni *bonding social capital* yang dicirikan dengan banyaknya ikatan antar kelompok (*across ethnic group*) dimana responden terlibat sebagai anggota atau bagian dari kelompok tersebut. Pada gambar 6 di bawah menunjukan bahwa sebagian

besar responden (64%) hanya terlibat pada 0-2 organisasi kelompok, hal ini memberikan gambaran keterlibatan responden sangat terbatas pada kelompok yang kemungkinannya eksklusif dalam hal keanggotaan, tetapi terbuka menerima perbedaan ataupun keragaman bagi pengembangan kelompok tersebut.

Misalnya ikatan kekeluargaan berdasarkan daerah asal, sebagian lagi sebesar 10% sangat aktif terlibat dalam organisasi kelompok sosial lainnya yang kemungkinan organisasi kelompok sosial masyarakat ini sifatnya terbuka untuk siapa saja yang berminat dan tentu saja perbedaan dan keragaman sangat dihargai misalnya kelompok unsur dalam lingkungan kelurahan, distrik maupun pada level yang lebih tinggi di kabupaten/kota.

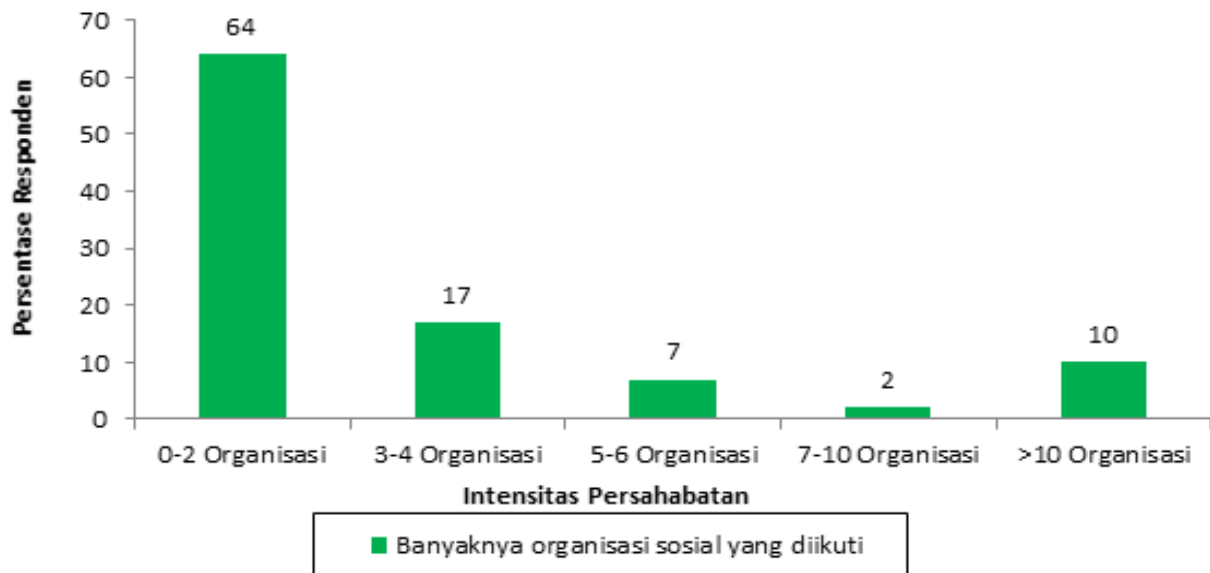
Unsur subdimensi *network* yakni *linking social capital* yang mencirikan hubungan antar kelas sosial yang berbeda dan diukur dari dua variabel yaitu kesediaan memberi pinjaman kepada tetangga untuk kebutuhan mendesak terutama untuk sekolah atau berobat dan kesiapan membantu apabila terjadi sebaliknya.

Gambar 7 mengungkapkan bahwa sebesar 80% siap memberikan bantuan bila ada warga atau anggota masyarakat di lingkungannya yang membutuhkan bantuan terutama untuk kebutuhan mendesak seperti biaya sekolah atau berobat. Namun sebaliknya 56%



Gambar 5. Persentase responden berdasarkan intensitas persahabatan

Keterangan: Variabel banyaknya keluarga yang menjadi sahabat : Tidak Ada (0-2 Keluarga), Sebagian Kecil (3-4 Keluarga), Separuhnya (5-6 Keluarga), Sebagian Besar (7-10 Keluarga), Semuanya (> 10 Keluarga).

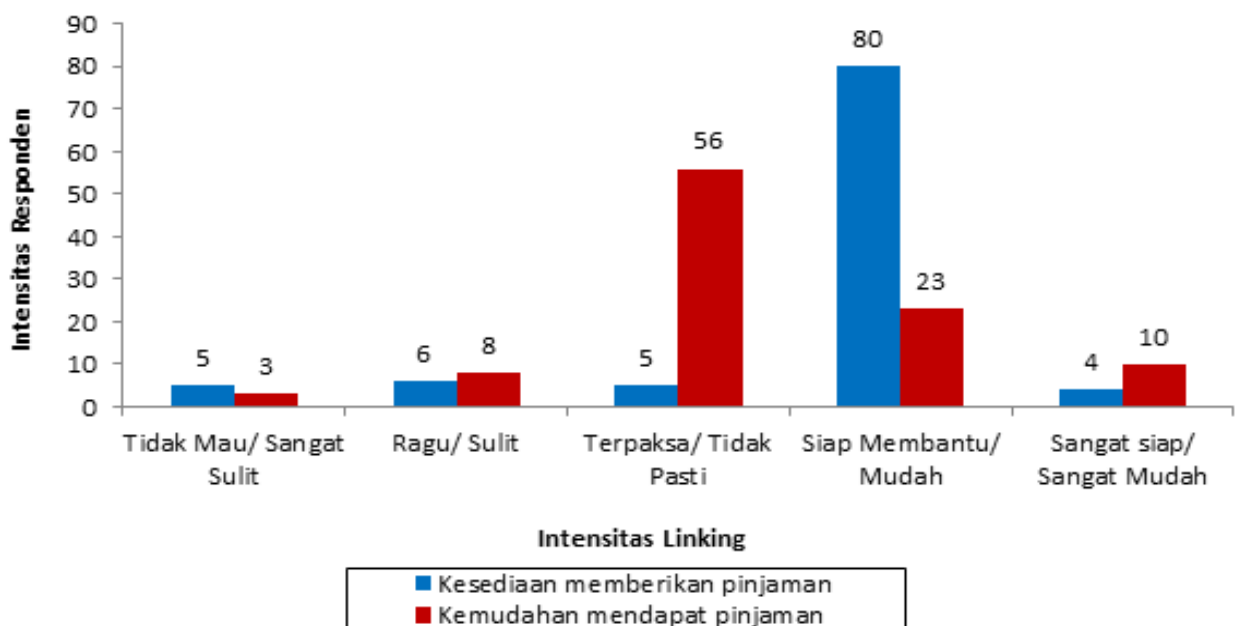


Gambar 6. Persentase responden berdasarkan intensitas dalam organisasi sosial

mengatakan tidak pasti mendapat pinjaman dari warga disebabkan karena mereka sendiri belum pernah meminjam untuk tujuan sekolah dan berobat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemapanan responden dari sisi ekonomi jauh lebih baik dibandingkan dengan anggota masyarakat lainnya yang menjadi tetangga.

Kesediaan memberikan bantuan merupakan wujud hubungan baik yang telah dibina secara bersama tetapi sifatnya insidental serta jarang terjadi secara berkelanjutan untuk kasus yang sama dengan warga yang sama ataupun warga lainnya, sehingga kesediaan membantu dan kemudahan memperoleh

bantuan linkingnya lebih banyak terbangun antar responden sesama kelompok suku di dalam lingkungan tempat tinggal atau berbeda tempat tinggal. Responden sebesar 56% sebaliknya merasa lebih nyaman memperoleh pinjaman untuk memenuhi kebutuhannya pada unit/lembaga simpan pinjam resmi, situasi seperti ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa tetangga atau warga lainnya pasti mempunyai kebutuhan mendesak yang juga harus dipenuhi, sehingga ada keraguan atau ketidakpastian jikalau harus memohon bantuan/pinjaman kepada tetangga.



Gambar 7. Persentase responden berdasarkan intensitas dalam membangun linking

Tabel 4.
Hasil output analisis regresi logistik ganda

Predictor	Coeficien	Odds ratio	Number	Percent
Constant	-18,9991			
Trust (X2)	2,93141	18,75		
Norm (X3)	0,893690	2,44		
Network (X4)	0,721453	2,06		
Tempat tinggal (X5)	-1,09155	0,10		
Ukuran hubungan (association)				
Concordant			1869	85,9
Discordant			303	13,9
Ties			4	0,2
Somers'D		0,72		
Goodman-Kruskal Gamma		0,72		
Kendall's Tau-a		0,32		
Uji_G		48,295		

Berdasarkan penjelasan subdimensi modal sosial sesuai hasil survei di Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong maka dapat disimpulkan bahwa nilai subdimensi *trust* yang tinggi lebih mengarah kepada tipe *thin trust* artinya kepercayaan yang dibangun bersama selama ini telah terinternalisasi (*embeddedness*) pada responden Papua maupun non Papua sehingga modal sosial yang terbentuk merupakan tipologi *bridging social capital*.

D. Pengaruh Modal Sosial terhadap Disparitas Pembangunan

Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh modal sosial *trust* (X_2), *norm* (X_3), *network* (X_4) dan Tempat Tinggal (X_5) terhadap keputusan seseorang untuk mempengaruhi peningkatan atau mengurangi tingkat disparitas (Y) di Papua Barat digunakan regresi model logit (Juanda, 2009^b) dimana berdasarkan hasil skor nilai sub dimensi modal sosial serta sesuai dengan hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan sebelumnya, bila salah satu sub dimensi modal sosial di Papua Barat tinggi (>4,8) maka responden berpengaruh mengurangi tingkat disparitas pembangunan dan bila masing-masing nilai sub dimensi modal sosial <4,8 maka keputusan responden berpengaruh meningkatkan disparitas pembangunan wilayah.

Y =	1,	Jika responden berpengaruh menurunkan disparitas wilayah
	0,	jika responden berpengaruh meningkatkan disparitas wilayah
$X_5 =$	1,	Jika responden bertempat tinggal di Sorong
	0,	jika responden bertempat tinggal di Manokwari

Dugaan model regresi logistik gandanya:

$$\hat{Y} = P(x_i) = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_1 + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \beta_4 X_{4i} + \beta_5 D_{1i})}} \quad (5)$$

Logit dari model tersebut adalah:

$$g(x_i) = \ln \frac{P(x_i)}{1 - P(x_i)} = \beta_1 + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \beta_4 X_{4i} + \beta_5 D_{1i} \quad (6)$$

Dengan menggunakan paket program Minitab, diperoleh hasil output analisisnya seperti pada Tabel 4.

Hasil output Minitab tabel 4 di atas diperoleh dugaan model regresi logistik gandanya berikut ini:

$$\hat{Y} = P(x_i) = \frac{1}{1 + e^{-(-18.99 + 2.93X_{2i} + 0.89X_{3i} + 0.72X_{4i} - 1.09D_{1i})}} \quad (7)$$

Logit dari model di atas adalah:

$$g(x_i) = \ln \frac{P(x_i)}{1-P(x_i)} = -18.99 + 2.93X_{2i} + 0.89X_{3i} + 0.72X_{4i} - 1.09D_{1i} \quad (8)$$

Nilai statistik Uji_G = 48.295 yang dihitung dengan Persamaan (3) dan nilai-p nya, dapat disimpulkan bahwa model regresi logistik pada Persamaan (8) secara keseluruhan dapat menjelaskan atau memprediksi keputusan responden dalam mengurangi tingkat disparitas pembangunan wilayah (Y) atau minimal ada $\beta_j \neq 0$ untuk $j=2, 3, 4, 5$.

Untuk menguji faktor mana ($\beta_j \neq 0$) yang berpengaruh nyata terhadap keputusan pilihan responden, digunakan uji signifikansi dari parameter koefisien secara parsial dengan statistik uji Wald pada Persamaan (4) yang serupa dengan statistik uji-t atau uji-Z dalam regresi linear biasa (Juanda, 2009^b). Hipotesis statistik yang di uji adalah:

$H_0 : \beta_j = 0$ untuk $j = 2, 3, 4, 5$ (peubah X_j tidak berpengaruh nyata)

$H_1 : \beta_j \neq 0$ (peubah X_j berpengaruh nyata)

Berdasarkan hasil output dengan paket program Minitab di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi keputusan responden dalam mempengaruhi disparitas pembangunan di Papua Barat adalah sub dimensi *trust* (X2) yang dapat dijelaskan bahwa peluang dalam mempengaruhi penurunan disparitas pembangunan wilayah adalah sub dimensi *trust* dengan nilai *odds-ratio* sebesar 18,75 hal ini berarti bahwa nilai *odds-ratio* subdimensi *trust* mempunyai peluang mempengaruhi penurunan disparitas pembangunan wilayah sebesar 18,75 kali dibandingkan dengan variabel lainnya jika *norm* (X3), *network* (X4) dan tempat tinggal (X5) sama.

Output Minitab juga menampilkan ukuran hubungan (asosiasi) antara nilai aktual peubah respons (Y) dengan dugaan peluangnya $P(x)$, dimana dari nilai *Concordant* dapat disimpulkan bahwa 85,9% pengamatan dengan kategori mengurangi disparitas pembangunan wilayah

(Y=1) mempunyai peluang lebih besar pada kategori mengurangi disparitas pembangunan (Y=1). Sedangkan dari nilai *Discordant* dapat disimpulkan bahwa 13,9% pengamatan dengan kategori meningkatkan disparitas pembangunan wilayah (Y=0) mempunyai peluang lebih besar pada kategori mengurangi disparitas pembangunan (Y=1). Sedangkan *Ties* dengan nilai sebesar 0,2% merupakan persentase pengamatan dengan peluang pada kategori mengurangi disparitas pembangunan wilayah sama dengan peluang pada kategori meningkatkan disparitas pembangunan wilayah dan dari ukuran ringkas asosiasinya yakni *Somers'D*, *Goodman-Kruskal Gamma* serta *Kendall's Tau-a* cukup besar dimana semakin besar ukuran asosiasi ini ke nilai 1, maka semakin baik daya prediksi dari model dugaan yang diperoleh.

Pembangunan wilayah di Provinsi Papua Barat berlangsung melalui kegiatan yang dilakukan secara individual maupun secara kolektif dan telah diwujudkan dalam institusi pemerintah, adat dan agama serta ada substitusi peran pembangunan dari ketiganya meskipun lebih didominasi oleh intitusi pemerintah mengakibatkan terjadinya fenomena *hermeutic* yakni cenderung mengisolasi diri dari permasalahan-permasalahan yang kompleks, salah satunya mengabaikan peran modal sosial dalam pembangunan wilayah.

Agar modal sosial dapat berperan secara efektif dalam mendorong akselerasi pembangunan yang lebih merata di Provinsi Papua Barat maka harus dilakukan tindakan "diskriminatif" yang positif terhadap Papua dan non Papua, diskriminasi yang dimaksudkan disini berupa *affirmative action/affirmative policy* yang tetap sinergi dengan non Papua. Sebelumnya, upaya *affirmative* telah dilakukan oleh pemerintah melalui Perpres Nomor 66 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) namun demikian UP4B hanya merupakan instrumen percepatan pembangunan dan bukan eksekutor pembangunan.

Tindakan diskriminatif selama ini tidak dapat berjalan secara berkesinambungan karena hanya bersifat umum dalam bentuk himbauan yang disampaikan oleh pemerintah, adat dan gereja tentang representatif Papua dalam semua sektor pembangunan di Papua Barat, seharusnya dapat diterbitkan

produk hukum secara bejenjang dalam bentuk peraturan daerah kabupaten/kota, peraturan daerah provinsi ataupun peraturan daerah khusus guna mendukung tindakan diskriminasi positif sehingga tersedia dasar hukum bagi setiap pengambil kebijakan dalam mengeksekusi tindakan diskriminatif tersebut. Kendala yang dihadapi selama ini disebabkan karena: (1) tidak tanggapnya peran legislatif (*legislative failure*) akan persoalan pembangunan sesuai dengan kebutuhan mendesak (*real needed*) dari masyarakat secara luas terutama kelompok suku Papua yang sudah termarginalkan di atas tanahnya sendiri.

Para politisi lebih condong mengurus basis masa pendukungnya sebagai kontrak politik untuk pemilu yang akan datang, sehingga tidak dapat fokus memikirkan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang diskriminasi positif terhadap Papua dan non Papua, (2) himbauan tentang representasi Papua dalam semua sektor pembangunan telah memunculkan “salah pengertian” kelompok non Papua yang menguasai sebagian besar posisi penting dalam birokrat di wilayah Papua Barat sehingga menuntut kompensasi atas jasa-jasa mereka termasuk pendahulunya yang telah datang membangun Papua. Tuntutan ini mampu membangun opini dan menggiring persepsi birokrat Papua (*bureaucratic failure*) dengan budaya inklusifnya menjadi tersandera (*hostage*) mengakibatkan kegiatan pembangunan terhadap masyarakat Papua tidak efektif, (3) substitusi peran lembaga adat dan agama hanya sebagai mitra pembangunan dengan pemerintah daerah yang memiliki wewenang legal dalam menghasilkan dan menetapkan aturan daerah, hal ini menyebabkan lembaga adat (Dewan Adat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat) yang merupakan representasi orang Papua dan lembaga keagamaan hanya sebatas memberikan rekomendasi dan saran kepada pemerintah daerah tentang kebijakan-kebijakan pembangunan yang berpihak kepada Papua.

Oleh karena itu, agar modal sosial dapat terus berperan menurunkan tingkat disparitas pembangunan wilayah di Provinsi Papua Barat maka perlu mendorong para politisi untuk mampu dan tanggap dalam melihat persoalan di masyarakat secara holistik, sehingga

dapat menghasilkan peraturan daerah yang diskriminatif tetapi tetap bersinergi dengan non Papua dalam pembangunan wilayah. Selain itu peran aktif dari pemerintah daerah dalam melibatkan lembaga adat dan lembaga keagamaan agar terus berpartisipasi dalam memberikan kontribusi pemikiran maupun dukungan rekomendasi bagi penguatan modal sosial dalam pembangunan wilayah.

IV. KESIMPULAN

Modal sosial adalah *capital* yang muncul sebagai akibat adanya interaksi sosial yang positif dan bisa menekan biaya transaksi. Rasa percaya (*trust*) membutuhkan waktu yang lama untuk dapat membangun rasa saling percaya, namun hanya membutuhkan waktu yang singkat untuk menghilangkannya. Ketika masyarakat diliputi oleh rasa saling tidak percaya maka kerjasama tidak akan terbangun. Besaran nilai modal sosial terkini di Provinsi Papua Barat sebesar 67,38 dan berada pada kategori “kuat”. Kompleksitas penduduk di Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong mengakibatkan subdimensi modal sosial khususnya *trust* telah mengalami transisi dari *thick trust* menjadi *thin trust* disebabkan karena (1) responden secara bersama-sama telah tinggal dan menetap di tempat/lingkungan yang sama dalam waktu yang lama, (2) budaya inklusif orang Papua memungkinkan orang lain dapat *terhisap* menjadi bagian dari keluarga orang Papua, (3) dampak negatif dari otonomi daerah telah menciptakan primordialisme antar sesama suku di Papua dan (4) kawin campur (*mix married*). Hasil analisis lanjutan menunjukkan bahwa subdimensi *trust* berperan lebih besar dalam mempengaruhi keputusan responden untuk menurunkan tingkat disparitas pembangunan wilayah di Papua Barat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penelitian hingga penerbitan pada Jurnal *Igya Ser Hanjop* Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Barat. Kepada para editor dan reviewer yang telah memberi saran dalam perbaikan artikel ini.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Arrow, K. J. (2000). *Observations on social capital* (Social cap). World Bank.
- Bourdieu, P. (1980). *Le sens pratique (The Practical Sense)*. Minuit.
- Coleman, J. S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. *JSTOR: American Journal of Sociology*, 94(Supplement: Organizations and Institutions: Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure), S95–S120. <https://www.jstor.org/stable/2780243>
- Faisal, S. (2008). *Format-Format Penelitian Sosial*. Raja Grafindo Persada.
- Helliwell, J. F. (1996). *Economic Growth and Social Capital in Asia* (No. 5470). <https://doi.org/10.3386/W5470>
- Iyer, S., Kitson, M., & Toh, B. (2005). Social Capital, Economic Growth and Regional Development. *Regional Studies*, 39(8), 1015–1040. <https://doi.org/10.1080/00343400500327943>
- Karlsson, M. L., Björklund, C., & Jensen, I. (2012). *The Relationship between Psychosocial Work Factors, Employee Health and Organisational Production – a Systematic Review* (2012:8; Working Paper Series). https://ideas.repec.org/p/hhs/ifauwp/2012_008.html
- Ottobjer, L. (2005). *Bourdieu, Coleman and Putnam on Social Capital: Applications in Literature and Implications for Public Health Policy and Practice* [Karolinska Institutet]. <https://www.yumpu.com/en/document/read/15459081/bourdieu-coleman-and-putnam-on-social-capital>
- Putnam, R. D. (1993). The Prosperous Community: Social Capital and Public Life. *The American Prospect*, 13, 35–42. <https://faculty.washington.edu/matsueda/courses/590/Readings/Putham%201993%20Am%20Prospect.pdf>
- Reimer, B., Lyons, T., Ferguson, N., & Polanco, G. (2008). Social Capital as Social Relations: the Contribution of Normative Structures. *The Sociological Review*, 56(2), 256–274. <https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.2008.00787.x>
- Riduwan, & Kuncoro, E. (2011). *Cara Menggunakan dan Memaknai Path Analysis (Analisis Jalur)*. Penerbit Erlangga.
- Rumere, Z., & Onim, J. (2005). *Dengarlah Ottow Berbicara. Tentang Tanah dan Penduduk di Sebelah Timur Laut Tanah Papua* (Terjemahan). Sekolah Tinggi Teologia GKI Izaak Samuel Kijne.
- Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. R. (2011). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Yayasan Obor Indonesia.
- Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. R. (2018). *Perencanaan dan pengembangan wilayah*. Yayasan Obor Indonesia.
- Tabellini, G. (2010). Culture and Institution: Economic Development in The Region of Europe. *Journal of the European Economic Association*, 8(4), 677–716. <https://www.jstor.org/stable/25700901>
- Trigilia, C. (2001). Social Capital and Local Development. *European Journal of Social Theory*, 4(4), 427–442. <https://doi.org/10.1177/13684310122225244>
- Vervisch, T., Titeca, K., Vlassenroot, K., & Braeckman, J. (2013). Social Capital and Post-Conflict Reconstruction in Burundi: The Limits of Community-based Reconstruction. *Development and Change*, 44(1), 147–174. <https://doi.org/10.1111/dech.12008>